

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA (BSPS) DALAM MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK HUNI DI  
KELURAHAN BEROHOL KECAMATAN BAJENIS  
KOTA TEBING TINGGI**

**SKRIPSI**

OLEH :

DEWI HERLINA

NIM. 0501163204

Program Studi  
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**2021**

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA (BSPS) DALAM MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK HUNI DI  
KELURAHAN BEROHOL KECAMATAN BAJENIS  
KOTA TEBING TINGGI**

***SKRIPSI***

***Diajukan Untuk melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mencapai Gelar sarjana ekonomi Islam (SE)  
pada program Studi ekonomi Islam***

**OLEH :**

**DEWI HERLINA**

**NIM. 0501163204**

**Program Studi**

**EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Herlina  
NIM : 0501163204  
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi 12 November 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Setia Agung Gg Melati III Sunggal Kanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK HUNI DI KELURAHAN BEROHOL KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 18 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan



**Dewi Herlina**  
NIM. 0501163204

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA (BSPS) DALAM MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK HUNI DI  
KELURAHAN BEROHOL KECAMATAN BAJENIS  
KOTA TEBING TINGGI**

Oleh :


Dewi Herlina

NIM 0501163204

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Islam (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 18 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIDN. 2018087601

Pembimbing II



Tuti Anggraini MA

NIDN. 2031057701

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar, M.Si

NIDN.2003038701

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK HUNI DI KELURAHAN BEROHOL KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI” atas nama Dewi Herlina, NIM 0501163204, program studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 04 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 04 Februari 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,



Imsar, M.Si  
NIDN.2003038701

Sekretaris



Rahmat Daim Harahap, M.Ak  
NIDN. 0126099001

Anggota

Pembimbing I



Dr. Zuhri M. Nawawi, MA  
NIDN: 2018087601

Pembimbing II



Tuti Angraini, MA  
NIDN. 2031057701

Penguji I



Hendra Hermain, SE. M.Pd  
NIDN. 2010057302

Penguji II



Neila Susanti, S.Sos, M.S  
NIDN. 2028076902

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN. 20230476

## ABSTRAK

**Dewi Herlina, 0501163204. Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan bajenis Kota Tebing Tinggi).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah layak huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah yang berupa bantuan stimulant untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Perumahan Swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan informan sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi belum berjalan optimal. Termasuk penyaluran BSPS yang belum tepat sasaran, kurangnya partisipasi serta kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang program BSPS. Selain itu dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilakukan secara bergotong royong dengan sesama kelompok yang telah ditentukan tetapi pada kenyataannya masih dilakukan secara individual. Peneliti juga melihat bahwa implementor dalam pelaksanaan Program BSPS di Kelurahan Berohol masih belum memiliki ketegasan karena masih membiarkan masyarakat bekerja secara individual. Padahal mereka mengerti apa sebenarnya konsep dan tujuan program BSPS.

**Kata kunci: Program stimulant, perumahan swadaya, layak huni**

## **KATA PENGANTAR**

### ***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

*Alhamdulillahirobbil alamin*, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya berupa kesehatan serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat bertangkaikan salam senantiasa penulis limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah: Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berhol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari yang namanya hambatan, keluh kesah penulis serta segala masalah yang penulis jadikan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan demi untuk melanjutkan kesuksesan dimasa yang akan datang. Penulis mengucapkan banyak Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Dwi Anto dan Ibunda Boini, yang selalu memberikan banyak nasihat, dukungan, do'a, dan perhatian nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.

Selain itu, dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. M. Ridwan, MA selaku penasehat akademik yang turut membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan proposal skripsi.
5. Bapak Dr. Zuhrinal M. Nawawi selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Tuti Anggraini, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Keluarga yang sangat penulis cintai Bapak, Mamak, Saudara Kandung Penulis yaitu Mei Adi Sujoko, Dewi Sayanti, Budi Hariyanto Spd.i, Dewi Nurmiati Am.Keb, Muliyo Prayetno Spd.i, Dewi Hariani, S.E. selalu mendo'akan dan memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, serta nasihat-nasihat serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini serta semua Keponakan tersayang yang selalu menghibur dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan Teruntuk Sahabatku Cut Nurul Azizah, dan Indah Puji Lestari yang selalu ada dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Kawan- Kawan Seperjuangan Penulis Riza Nurul Aulia, SE, Rauza Alfany, S.E, May Indah Jelita Putri, Leni Lestari Simatupang, Nelisya Puti, yang selalu memberikan dukungan dan saling Support diantara kami. Terimakasih untuk pertemanan yang sudah terjalin selama 4 tahun ini.
9. Seluruh teman-teman Seperjuangan Ekonomi Islam C angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu berjuang bersama dalam proses perkuliahan.
10. Serta terima kasih kepada semua yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahnya dalam pembuatan skripsi ini.




Tidak ada yang dapat diucapkan selain dari ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas segala kebaikan bapak, ibu, saudara. Tentunya skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirul kalam.

*Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 18 Januari 2021

Penulis



**Dewi Herlina**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Kesejahteraan Sosial.....	10
a. Pengertian Kesejahteraan Sosial.....	10
b. Konsep Kesejahteraan .....	12
c. Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Islam .....	12
2. Kebijakan Publik .....	13
a. Pengertian Kebijakan Publik .....	13
b. Manfaat Kebijakan Publik .....	16
c. Karakteristik Kebijakan Publik .....	17
d. Implementasi Kebijakan Publik.....	17

3.	Kebutuhan Rumah/papan .....	19
a.	Standart rumah layak huni .....	19
b.	Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman ... .....	20
4.	Kebijakan Pembangunan Permukiman dan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah .....	21
a.	Subsidi perumahan .....	22
b.	Perumahan swadaya .....	22
5.	Pemberdayaan Masyarakat .....	22
a.	Pengertian pemberdayaan masyarakat.....	22
b.	Prinsip-Prinsip Pemberdayaan.....	24
c.	Bantuan Stimulan PerumahanSwadaya .....	25
d.	Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.....	27
B.	Penelitian Terdahulu.....	28
C.	Kerangka pemikiran .....	32
D.	Konsep Operasional.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>34</b>
A.	Pendekatan Penelitian.....	34
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C.	Subjek Penelitian .....	34
D.	Jenis Data.....	35
E.	Informan Penelitian .....	35
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	37
G.	Teknik Analisa Data .....	38
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN .....</b>		<b>40</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1.	Gambaran Umum Kelurahan Berohol.....	40
2.	Luas Wilayah dan Kondisi Geografis.....	40
3.	Kependudukan .....	40
4.	Keadaan sarana dan Prasarana Kelurahan Berohol .....	41

5. Visi Misi Kelurahan Berohol.....	44
6. Struktur Organisasi/Lembaga Kelurahan Berohol .....	44
B. Temuan Penelitian .....	45
a. Standard dan sasaran Kebijakan .....	45
b. Sumber Daya .....	51
c. Hubungan Antar Organisasi .....	55
d. Dampak Sosial Ekonomi .....	58
C. Pembahasan .....	59
a. Standard dan Sasaran Kebijakan .....	60
b. Sumber Daya .....	61
c. Hubungan Antar Organisasi .....	61
d. Dampak Sosial Ekonomi .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
2.2	Konsep Operasional.....	33
2.3	Informan Penelitian.....	36
4.1	Jumlah Penduduk.....	41
4.2	Jumlah Sarana Ibadah.....	42
4.3	Jumlah Sarana Kesehatan.....	42
4.4	Jumlah sarana Pendidikan.....	43
4.5	Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1	Kerangka Pemikiran.....	32
4.1	Struktur Organisasi Kelurahan Berohol.....	44
4.2	Kondisi Rumah Penerima BSPS.....	51
4.3	Nota Penerima BSPS.....	55

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya rumah merupakan satu kebutuhan primer setelah pangan dan sandang terpenuhi. Setelah manusia memenuhi kebutuhan primer sebagai kebutuhan pokok manusia, baru manusia memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Selain sebagai pelindung dari segala cuaca dan gangguan alam juga makhluk lainya rumah juga memiliki fungsi yaitu sebagai pusat pendidikan keluarga, pusat persemaian budaya dan sebagai peningkatan kualitas generasi muda suatu bangsa. Kebutuhan pokok terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Teori Hierarki kebutuhan menurut Maslow mengemukakan kebutuhan manusia yang harus terpenuhi ada lima tingkatan diantaranya:<sup>1</sup>

1. Kebutuhan fisiologis

Meliputi sandang, pangan, papan seperti makan, minum, perumahan, tidur, dan lain sebagainya

2. Kebutuhan rasa aman

3. Kebutuhan sosial

4. Kebutuhan penghargaan

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati, dihargai dan diapresiasi seseorang, pengakuan atas faktor kemampuan dan keahlian seseorang serta efektivitas kerja seseorang

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang.

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 28H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak setiap orang. Karena setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

---

<sup>1</sup>Sunyoto dan Danang, *Perilaku Organisasional: Teori, Kuesioner, dan Proses Analisis Data Cet 1*. CAPS, Yogyakarta, 2013, h. 2

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>2</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam islam, bahwa tidak boleh ada yang kelaparan, tidak boleh ada yang dahaga (cukup memperoleh air), dan tidak boleh ada yang kepanasan (rumah untuk berlindung dari cuaca). Dan ini telah diatur dalam surah An-Nahl ayat 80 Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

Artinya: Allah telah menjadikan kita rumah rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai Dan waktu tertentu<sup>3</sup>

Allah telah menjadikan untuk kita rumah rumah sebagai tempat tinggal. Ayat ini menegaskan bahwa manusia harus punya kediaman. Tidak boleh ada manusia di jalanan yang tidak punya tempat tinggal. Rumah adalah nikmat Allah yang sering tidak kita sadari. Dengan rumah manusia banyak sekali mendapat kemudahan dan kesenangan hidup. Sesuai dengan amanat UUD 1945 negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut, diantaranya yaitu hak memperoleh tempat tinggal, Negara mengatur tentang kebijakan mengenai perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang mendasarkan segala sesuatu berdasarkan hukum. Pada pasal 33 UUD Tahun 1945 menyiratkan makna bahwa Indonesia adalah Negara *welfare state* atau negara kesejahteraan. *welfare state* diartikan bahwa pelayanan berkaitan dengan kesejahteraan warga Negara

<sup>2</sup>Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H tentang Hak Asasi Manusia

<sup>3</sup>Q.S. An-Nahal (16): 80



sepenuhnya disediakan oleh pemerintah khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua (pensiun) dan kecelakaan kerja.<sup>4</sup> Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spriritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.<sup>5</sup> Pengertian tersebut menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan.

Medgley menegaskan kesejahteraan sosial sebagai: “*a state or condition of human well-being that exists when sosial problems are met, and managed, when human needs are met, and when sosial opportunities are maxminized*” (suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.<sup>6</sup>

Pembahasan kebutuhan rumah tidak akan terlepas dari pembahasan backlog, secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan kata lain backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum tertangani. Tidak dipungkiri bahwa peningkatan angka backlog perumahan sangat dipengaruhi oleh adanya penambahan populasi penduduk disuatu daerah setiap tahunnya yang mana disetiap daerah jumlah kependudukannya tidaklah sama. Ada lima jenis kebijakan dalam memecahkan masalah kawasan kumuh:

1. Sikap *laisser fair*, pemerintah membiarkan dibangunnya perumahan liar mengikuti permainan ekonomi
2. *Alalmis approach*, pendekatan yang memandang bermunculan gubug gubug reyot kaum papa sebagai ancaman

---

<sup>4</sup>Eddy Kiswanto, *Negara Kesejahteraan(Welfare State) : Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik V.9 No. 2 (November 2005), h. 95

<sup>5</sup>UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>6</sup>Suradi, “*pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*”, dalam Jurnal Ekonomi, Vol:17 No 3, 2012, hal. 149

3. Pendekatan sisi (*partical approach*), pemerintah membiarkan subsidi kepada perusahaan swasta yang mendirikan perumahan bagi penduduk yang mampu membayar secara kredit.
4. Total approach, pendekatan yang menyeluruh, pemerintah mendirikan secara besar besaran perumahan untuk kaum ekonomi lemah
5. Pendekatan progresif (*progresif approach*), pemecah bersama penghuninya.<sup>7</sup>

Menurut data Kementerian PUPR per 8 Maret 2019, jumlah backlog sebanyak 7,6 juta unit. Pada tahun 2015, ada 699.770 unit rumah yang di bangun sebanyak 65 persen untuk MBR dan 35 persen untuk non-MBR. Kemudian pada tahun 2016 terbangun lagi total 805.169 unit rumah sebesar 71 persen untuk MBR dan 29 persen untuk non-MBR. Berikutnya, sebanyak 904.758 unit rumah berhasil dibangun pada 2017, dengan porsi 75 persen untuk MBR dan 25 persen untuk non-MBR. Selanjutnya pada tahun 2018, pencapaiannya 1.132.621 unit rumah yang diperuntukkan MBR sebanyak 70 persen dan non-MBR 30 persen. Memasuki awal tahun 2019, Ditjen penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengklaim bahwa hingga 11 februari 2019 telah terbangun 77.326 unit rumah, dengan rincian 65.875 unit untuk MBR dan 11.469 unit non-MBR.<sup>8</sup>

Dalam menangani permasalahan *backlog* rumah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bantuan ini merupakan pengungkit keswadayaan masyarakat dalam berbagai bentuk baik berupa tambahan dana, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Diharapkan bantuan ini dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan baik dari penerima bantuan itu sendiri, keluarga dan kerabat penerima bantuan, tetangga, maupun lingkungan sekitar, sehingga sejumlah bantuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni.

---

<sup>7</sup> Harahap I. et., Al. *Analisis Tingkat kesenjangan Pendapatan pada masyarakat Tebing Tinggi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015

<sup>8</sup> <https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-jumlah-backlog-rumah-capai-76-juta-unit-per-8-maret-2019/> di unduh tgl 11 Desember pukul 08:00 WIB

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah perumahan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi MBR. Bantuan ini merupakan bantuan pemerintah yang bersifat stimulant sehingga diharapkan dapat mendorong kemauan keluarga miskin penerima bantuan untuk bersama sama keluarga penerima bantuan yang lainnya bergotong royong dalam memperbaiki rumah dengan dibantu oleh masyarakat sekitar. Tentunya keterlibatan ini juga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Karena masing masing lintas sektor terkait yang bertanggung jawab dalam upaya kelancaran dan mencapai tujuan. Partisipasi masyarakat berupa gotong royong juga tak kalah penting dalam pelaksanaan kegiatan ini mengingat pengalokasian program ini juga untuk keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam memperoleh rumah yang layak. Biasanya lapangan pekerjaan masyarakat berpenghasilan rendah ini yaitu bekerja sebagai tukang bangunan, buruh, pemungut sampah, pembantu rumah tangga, penyapu jalanan, dsb. Dari hasil kerja MBR ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saja jauh dari cukup karena kebanyakan hasil upah dalam satu bulan masih dibawah standar UMR yang berlaku.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yaitu berupa sejumlah dana untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah. Perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok program ini memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini terdiri atas Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarakat rumah layak huni.

Kriteria dan persyaratan penerima BSPS menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.13/PRT/M2016 tentang pedoman pelaksanaan Stimulan Perumahan Swadaya, meliputi:

1. Warga Negara Indonesia
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan yang tetap atau tidak tetap
3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki atau menguasai tanah
5. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tidak layak huni
6. Menghuni rumah yang akan diperbaiki
7. Belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat
8. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
  - a. Memiliki tabungan bahan bangunan
  - b. Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulant
  - c. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuann stimulant pembangunan dan peningkatan kualitas rumah
9. Bersungguh sungguh mengikuti program batuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya.

Salah satu daerah pelaksanaan Program BSPS ini adalah Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Menurut pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Setempat Program ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan Pemko Tebing Tinggi kepada warga

miskin guna memperbaiki kehidupannya.<sup>9</sup> Pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni masih jauh dari harapan, maka pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah secara terus menerus untuk melaksanakan kegiatan bantuan stimulan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak.

Dari teori yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Namun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya di kelurahan Berohol yaitu masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Akibatnya, masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak, seperti yang di utarakan Bapak Anto warga Kelurahan Berohol, bahwa penerima BSPS di Kelurahan Berohol rata rata merupakan warga yang berkecukupan dalam hal ekonomi sedangkan warga yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan dikatakan lebih layak menerima bantuan BSPS namun tidak mendapat bantuan tersebut padahal ikut dalam pengajuan.<sup>10</sup> Kemudian peneliti juga menemukan masalah lain bahwa dalam pelaksanaan Program BPS bahan bangunan yang disediakan tidak dengan kualitas yang baik. Seperti yang diutarakan Bapak Ucok warga Kelurahan Berohol, bahwa dana BPS yang diberikan hanya dipegang ketika pengambilan dari Bank, setelah itu dana tersebut diserahkan kepada petugas kemudian dibelanjakan bahan bangunan. Kemudian bahan bahan bangunan yang diserahkan kepada beliau untuk melakukan perbaikan rumah, kualitasnya kurang baik.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ali yustono, “ 150 Gakin Tebing Tinggi Terima Bantuan RTLH”, <https://mdn.bis.id/n/111027/> 12 Agustus 2014

<sup>10</sup>Anto, Masyarakat Kelurahan Berohol, *wawancara* di Tebing Tinggi 23 Februari 2020

<sup>11</sup>Ucok, Penerima BPS, *wawancara* di Tebing Tinggi, Tanggal 23 Februari 2020

Peneliti juga melihat bahwa implementor dalam pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Berohol ini masih belum memiliki ketegasan karena masyarakat masih dibiarkan bekerja secara individual dan cenderung apatis terhadap hal tersebut. Padahal mereka mengerti apa sebenarnya konsep dan tujuan program BSPS yaitu untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat agar mandiri dan berdaya guna. Implementor baik dari Dinas perkim maupun fasilitator belum mampu mengajak masyarakat sadar dan faham dengan konsep dari BSPS walaupun sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya.

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul " **Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi**".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Hasil analisis pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana hasil analisis pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah layak huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam program studi Ekonomi Islam mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah layak huni.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi program pemerintah khususnya Dinas Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya serta menjadi bahan masukan Dinas terkait untuk menciptakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tepat sasaran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kesejahteraan Sosial

###### a. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Secara etimologis, kata kesejahteraan terbentuk dari kata sejahtera yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera berarti aman, sentosa dan makmur. Selamat dari berbagai macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Dengan demikian kesejahteraan sosial adalah keadaan masyarakat yang sejahtera yakni masyarakat yang aman secara sosial, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem sosial.

Adapun secara terminologis ada beberapa pengertian kesejahteraan sosial yang dikemukakan para ahli:

1. Edi Suharto kesejahteraan sosial mengandung empat makna yakni:
  - a) Kondisi sejahtera
  - b) Pelayanan sosial
  - c) Tunjangan sosial
  - d) Proses atau usaha terencana
2. Menurut Zastrow, seperti dikutip Miftachul Huda, pada dasarnya kesejahteraan sosial juga dapat difahami dalam dua konteks, yaitu sebagai sebuah institusi dan disiplin akademik.
3. Menurut James Midley, seperti dikutip Miftachul Huda, suatu kondisi bisa dikatakan sejahtera, apabila memenuhi tiga ukuran kesejahteraan, yaitu<sup>12</sup>
  - a) Ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik.

Semua orang pasti akan menghadapi suatu permasalahan dalam hidupnya, namun setiap orang juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga dapat

---

<sup>12</sup>James Midley, Dalam Bukunya Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 72



disimpulkan, bahwa kesejahteraan tergantung pada bagaimana kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan.

b) Ketika kebutuhan-kebutuhan dapat tercukupi

Setiap orang, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam hal keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dan pergaulan, dan kebutuhan non-ekonomi lainnya.

c) Ketika peluang sosial dalam masyarakat terbuka secara maksimal

Untuk merealisasikan setiap potensi yang ada dari anggota masyarakat perlu ada langkah memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah dapat memperbesar peluang tersebut dengan cara meningkatkan program pendidikan maupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkannya.<sup>13</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa, kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.<sup>14</sup> Kesejahteraan sosial dapat difahami sebagai program pelayanan maupun pertolongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai sebuah disiplin akademik, kesejahteraan sosial mengacu kepada suatu studi terhadap lembaga, program maupun kebijakan yang fokus pada pelayanan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomer 11 tahun 2009 pasal 1 ayat (1), kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,

---

<sup>13</sup>Waryono Abdul Ghafur, et. Al., *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Prodi Kesejahteraan Sosial UIN suka dan Samudra Biru, 2012), h. 6

<sup>14</sup> Zastrow, Dalam Bukunya Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 73

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 74

dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>16</sup>

### **b. Konsep Kesejahteraan**

Menurut Graff terdapat tiga konsep kesejahteraan sosial yang berbeda yaitu:

1. Konsep Kesejahteraan Sosial Paretian

Konsep ini digunakan oleh Pareto dan para penerusnya. Menurut konsep ini kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan kolektif yang terdiri dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep ini menyatakan bahwa bila sekurang-kurangnya satu orang menjadi lebih baik dan tidak seorang pun menjadi lebih buruk keadaannya maka kesejahteraan sosial mengalami kenaikan.

2. Konsep kesejahteraan sosial Bergson.

Konsep ini mencakup lebih banyak kasus dimana perubahan organisasi ekonomi membuat beberapa orang menjadi lebih baik dan orang menjadi lebih buruk.

3. Konsep kesejahteraan sosial paternalist

Dimana konsep ini adalah konsep yang menggambarkan pandangan pandangan penguasa paternalis atau Negara, dan bukan individu-individu atau masyarakat. Ini berarti bahwa Negara mempunyai ide tentang kesejahteraan sosial maksimum yang akan dicapai.<sup>17</sup>

## **4. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam**

Dalam Islam pendefinisian tentang kesejahteraan didasarkan pandangan tentang kehidupan ini. Menurut ajaran Islam, kesejahteraan mencakup dua pengertian, yaitu:

1. kesejahteraan holistic dan seimbang yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)

<sup>17</sup> Achmad Daengs, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*, (Jawa Timur: Unitomo Press, 2019), h. 17

kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

2. kesejahteraan dunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di alam setelah kematian dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai di dibandingkan kehidupan di dunia.<sup>18</sup>

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta, atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari lima tujuan ini di bagi menjadi beberapa tingkat yaitu:<sup>19</sup>

1. Kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal
2. Kebutuhan sekunder yang terdiri dari semua kegiatan dalam hal hal vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup
3. Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dalam hal hal lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, yang terdiri dari hal hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

## **2. Kebijakan Publik**

### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Publik sangat berkaitan erat dengan administrasi Negara ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas. Kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin adalah sarana

---

<sup>18</sup> Muhammad Anshar, “ *Peran dan Dampak Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Warga Kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan*”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No.2 (Juli-Desember 20017), H. 30

<sup>19</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Edisi Ketiga, 2010), h. 62

untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik.

Pendapat lain tentang kebijakan menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewit adalah suatu keputusan yang menuntut adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan. Sedangkan menurut Said Zainal Abidin alumni *University of Pittsburgh Pennsylvania, US*, Publik adalah biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu publik berfungsi sebagai pengontrol keputusan-keputusan khusus dibawahnya.<sup>20</sup>

Dalam Kamus Besar Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asa yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 38 berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka<sup>21</sup>

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa sesuai dalam petunjuk Al-Quran, bahwa Rasulullah Saw selalu mengembangkan budaya bermusyawarah di kalangan para sahabatnya. Meskipun beliau merupakan seorang Rasul, tetapi beliau sangat gemar berkonsultasi dalam soal-soal kemasyarakatan bersama para pengikutnya. Tetapi dalam berkonsultasi Rasulullah Saw tidak hanya mengikuti polanya saja. Beliau sering bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior. Beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang ahli dalam hal yang

<sup>20</sup>Uddin B.Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, ( Makassar: CV. Sah Media, 2017), h.4

<sup>21</sup> Q.S. Asy-syura :38

dipersoalkan atau profesional. Terkadang beliau juga melempar sebuah masalah-masalah kepada pertemuan besar, khususnya masalah yang berkaitan dan memiliki dampak besar pada kepentingan masyarakat.

Selain itu dapat kita fahami juga bahwa orang yang berkomitmen dalam ketaatan dengan musyawarah, menegakkan prinsip bermusyawarah, serta selalu memanfaatkan rezky yang diberi oleh Allah SWT selalu dinafkahkan pada jalan yang Allah Ridhoi, maka balasannya di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu berupa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang kekal didalam surga. termasuk bagi orang yang taat pada Tuhan mereka.

Kebijakan merupakan suatu analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Adapun teori para ahli tentang kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah " apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.<sup>22</sup>
2. Menurut James E. Anderson adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seseorang atau atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah. Sedangkan kebijakan publik menurut Charl Friedrich bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.<sup>23</sup>
3. Wibawa mengemukakan pendapat bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik dari tingkat pusat maupun tingkat terendah atau badan/lembaga/organ supra-negara. Pemerintah yang dimaksud ialah negara, provinsi, kota, desa, RW, dan RT. Supra-negara yang

---

<sup>22</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung:Alfabeta cv, 2013), hal. 39

<sup>23</sup>Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, Edisi ke-1 2011), h. 2

dimaksud disini seperti ASEAN, EU, dan WTO, karena semua itu juga merupakan sistem politik. Kebijakan publik senantiasa berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik, baik hubungannya secara positif/aktif (dikerahkan sumber daya untuk suatu isu) maupun negatif/pasif (tidak dikerahkan sumber daya untuk suatu isu, agar tersedia dan dapat digunakan untuk isu lainnya). Dari pandangan ini, Wibawa juga menegaskan bahwa negara dalam konteks ini bukan harus dihentikan dengan wilayah yang luas seperti Indonesia. Namun yang patut ditekankan adalah wilayah yang memiliki pemerintah yang didalamnya terjadi pengaturan untuk hidup bersama.<sup>24</sup>

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur, baik dilakukan pemerintah atau melibatkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik juga diartikan sebagai suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi harus dipahami secara benar. Artinya ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

#### **b. Manfaat Kebijakan Publik**

Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu juga halnya dengan kebijakan publik, yang memiliki manfaat cukup banyak. Berikut penulis uraikan manfaat baik yang akan diterima oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan publik pada umumnya berorientasi pada masyarakat, ada tiga hal yang tidak boleh hilang dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan publik, yaitu:

- 1) Bahwa tujuan kebijakan secara umum adalah untuk menjadikan rakyat berdaya. Berdaya artinya kemampuan untuk membangun diri sendiri

---

<sup>24</sup>Dody Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Malang:Inteligensia, 2017), h. 17

(secara individual maupun kelompok), dengan meminimalkan ketergantungan pada uluran tangan pemerintah

- 2) Mengingat kemerosotan yang terjadi di suatu bangsa khususnya di Indonesia sendiri saat ini, disebabkan karena masyarakatnya tidak memiliki daya dan kemampuan, tetapi daya dan kemampuan dituntut untuk hidup dijamin pra-globalisasi. Kebijakan subsidi, proteksi, tidak responsive pasar, kurang mengakomodasi desakan demokrasi, curiga kepada *civil society* dan sejenisnya adalah kebijakan yang tidak konsektual.
- 3) Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Tujuan strategis ini setara dengan prinsip pengelolaan manajemen, yakni optimalisasi risorsis atau sumber daya.<sup>25</sup>

### c. Karakteristik Kebijakan Publik

Beberapa karakteristik kebijakan public yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai
2. Adanya tindakan tindakan tertentu yang ingin dicapai
3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan public
4. Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apapun.<sup>26</sup>

### d. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah proses metamorfosis suatu rencana kedalam praktik.<sup>27</sup> Menurut Gordon implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterprestasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit unit dan metode

---

<sup>25</sup>Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta:Gramedia, 2004), h. 266

<sup>26</sup>Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar:CV.Sah Media, 2017), h.35

<sup>27</sup>Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung:Alfabeta, 2013), h.57

untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat di terima *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.<sup>28</sup>

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan didalam proses kebijakan. Maka, dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, menurut prespektif agama islam dalam Al-quran surat An-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>29</sup>

Surah ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam melakukan dialog harus dilakukan dengan kebijaksanaan serta menyampaikan lisan yang benar agar berlangsung dengan sebaik mungkin. Hal tersebut tentu memberi pemikiran penting dalam melaksanakan tahapan-tahapan kebijakan publik pada umumnya dan mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor politik dengan tujuan yang telah dipilah beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan itu pada prinsipnya masih

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 58

<sup>29</sup>Q.S. An- Nahl (16):125



berada dalam batas kewenangan, kekuasaan dari pada aktor politik pada khususnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat salah satu program pemerintah yakni, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan oleh pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai upaya meningkatkan kualitas Rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.

### **3. Kebutuhan Rumah/papan**

#### **a. Standar Rumah layak Huni**

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Berdasarkan Habitat for Humanity Indonesia, terdapat 3 point penting yang harus kita ketahui dan terapkan sebagai syarat sebuah rumah bisa dikatakan sebagai rumah layak huni.

##### **1. Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan**

Point pertama yang harus kita ketahui sebagai salah satu syarat rumah layak huni adalah keselamatan bangunan. Hal ini bisa kita capai dengan menerapkan standar mengenai struktur bangunan yang terdiri dari struktur bawah bangunan atau pondasi, struktur tengah bangunan atau *ring balk*, serta struktur atas bangunan atau atap.

Keselamatan bangunan dapat tercapai jika kita menerapkan standar kualitas dengan kompetensi bangunan yang tertuang dalam sertifikasi dan standarisasi. Dengan penerapan standar tersebut, peluang terjadinya kegagalan bangunan bisa terminimalisir.

##### **2. Menjamin Kesehatan Bagi Para Penghuninya**

Selain harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, point penting kedua yang harus kita penuhi untuk mewujudkan rumah layak huni yaitu bangunan harus menjamin kesehatan para penghuninya. Hal ini dapat kita capai dengan menerapkan standar pencahayaan, penghawaan dan fasilitas sanitasi bangunan.

### 3. Memenuhi Kecukupan Luas Minimum

Poin penting terakhir yang harus kita terapkan untuk membangun sebuah rumah layak huni yaitu kecukupan luas minimum bangunan. Sebuah rumah yang memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah terdiri dari ruang tidur atau ruang serba guna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

### **b. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman**

Ada tiga kebijakan dan strategi nasional yaitu :

1. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat (partisipatif) sebagai pelaku utama, melalui strategi
  1. Penyusunan pengembangan dan sosialisasi berbagai produk peraturan perundang undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman
  2. Pemantapan kelembagaan perumahan dan permukiman yang handal
  3. Pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan
2. Mewujudkan perumahan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, melalui strategi
  1. Pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pada perumahan (primer dan skunder)
  2. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu keswadayaan masyarakat
  3. Pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan, dapat berbentuk subsidi pembiayaan, subsidi prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan perumahan dan perumahan ataupun kombinasi kedua subsidi tersebut
  4. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
  5. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak bencana alam dan kerusakan social
  6. Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara, melalui pembinaan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan aset bangunan gedung dan rumah negara.

3. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian, dan produktivitas masyarakat, melalui strategi
  1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan memprioritaskan kawasan permukiman kumuh di perkotaan pesisir
  2. Pengembangan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman
  3. Penerapan tata lingkungan permukiman<sup>30</sup>

#### **4. Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Kebijakan perumahan dan permukiman di Indonesia pada awalnya awalnya atau sebelum merdeka (Pra Kemerdekaan) masih terbatas pada penyediaan perumahan hanya untuk pegawai negeri, rumah sewah dan perbaikan lingkungan dalam rangka kesehatan. Sementara pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebijakan perumahan dan permukiman masyarakat pada waktu tersebut dijalankan melalui *Burgerlijke Woningenregeling* 1934 yang pelaksanaannya menggunakan *Algemene Voorwaden voor de uitvoering bij aaneming van Openbare Werken in indie 1941* serta *Indische Comptabiliteits wet*. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan oleh Departement Van Vekerr en Waterstaat yang menangani perumahan rakyat (*volkshuivesting*) dan bangunan gedung rumah tangga.<sup>31</sup>

Tujuan pokok pembangunan permukiman dan perumahan adalah meningkatkan kesediaan rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, dan meningkatkan sistem permukiman yang teratur, layak huni, budaya, ramah lingkungan, dan efisien, yang dapat mendukung, produktifitas dan kreativitas masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

---

<sup>30</sup> Iwan Suprijanto, *Revormasi Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman "dalam jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol. 32, No. 2, Desember 2004, h. 161-170

<sup>31</sup> Lucy Yosita, et al, *Strategi Perencanaan dan Perancangan Perumahan pada era Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 1

Untuk mencapai tujuan diatas, strategi kebijakan dalam pembangunan permukiman dan perumahan yang dilakukan adalah:

1. Pembangunan institusi pembiayaan primer dan skunder dalam pembangunan perumahan dan permukima
2. Mengembangkan sistem penyediaan pembangunan dan perbaikan hunian yang layak
3. Mengembangkan sistem subsidi hunian bagi masyarakat miskin
4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana permukiman dikawasan perkotaan dan pedesaan
5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan perdesaan agar supaya tidak berlebihan.<sup>32</sup>

#### **a. Subsidi Perumahan**

Subsidi perumahan adalah suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa: subsidi selisih bunga, penambahan dana pembangunan, perbaikan rumah.<sup>33</sup>

#### **b. Perumahan Swadaya**

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara mandiri maupun berkelompok. Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.<sup>34</sup>

### **5. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **a. Pengertian pemberdayaan masyarakat**

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber-menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan,

<sup>32</sup>Raharjo Adisasmata, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 71

<sup>33</sup> Dora Kusumastuti, *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan* Dalam jurnal Kebijakan Publik, Vol:4. No.3 September 2015, h. 3

<sup>34</sup> Dr. Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 22

berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe-dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>35</sup>

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Empowerment”, pemberdayaan berasal dari kata “Power” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.<sup>36</sup>

pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>37</sup>

Dalam buku Edi Suharto, terdapat beberapa pakar menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, Proses, dan cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat memberdayakan masyarakat, pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Masih dalam buku tersebut, Person juga berpendapat bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan

---

<sup>35</sup>Rosmedi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatienegoro, 2006), h. 1

<sup>36</sup>Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED)

<sup>37</sup>Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005), cet ke-1, h. 58

orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat memberdayakan masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi pemberdayaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang engalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi. Mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>39</sup>

## **b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan**

Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu, terdapat empat prinsip yaitu

### **1. Prinsip Kesetaraan**

Prinsip utama yang harus dipegang dalam pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.

### **2. Prinsip partisipasi**

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 57

<sup>39</sup>*Ibid.*, h.60

dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing masing individu.

3. Prinsip keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah ia yang lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.

4. Prinsip berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri.<sup>40</sup>

### **c. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2011 pasal satu tentang perumahan, rumah adalah Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah sangat berfungsi penting bagi setiap individu maupun keluarga. Jadi dalam mewujudkan rumah yang sesuai dengan fungsinya tersebut perlu adanya dorongan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 88 Tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dimana dalam pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/M2016 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini merupakan salah satu program Bantuan sosial pemerintah pusat di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat

---

<sup>40</sup>Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h. 11

berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan dana yang bersifat material bangunan.

Yang menjadi latar belakang terbentuknya dan munculnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah menjadi tanggung jawab Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomer 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keswadayaan Masyarakat

Bantuan yang diberikan pemerintah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencukupi kualitas kelayakan rumah supaya dapat dihuni diperlukan adanya komitmen dan kesiapan dari masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang bisa dijadikan dana tambahan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan yang dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi masyarakat sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

c. Transparan

Kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

d. Dapat dipertanggung jawabkan

Kegiatan harus bisa dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat

e. Pembangunan mandiri pasca kegiatan



Pembangunan mandiri pasca konstruksi merupakan kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesai program. Yang dilakukan atas inisiatif dan dengan dana dari masyarakat sendiri.

Kriteria penerima Bantuan stimulant Perumahan swadaya:

1. Warga Negara Indonesia
2. Masyarakat Bepenghasilan rendah
3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki hak katas tanah
5. Memiliki rumah tidak layak huni
6. Menghuni rumah yang akan diperbaiki
7. Belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dari kementerian PUPR
8. Didahulukan yang telah memiliki untuk memperbaiki rumah
9. Bersungguh sungguh mengikuti program BSPS

#### **d. Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

Adapun tujuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah:

1. Menyediakan instrument penyelenggaraan perumahan swadaya yang dapat di acu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan lingkungan secara swadaya.
2. Menyediakan program dan kegiatan yang dapat membantu mendorong, memfasilitasi dan mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilakukan secara swadaya.
3. Mempercepat tersedianya rumah layak huni dalam lingkungan sehat, tertib, aman dan nyaman dengan cara terjangkau.

Adapun sasaran fungsional kegiatan Batuan Stimulan Perumahan swadaya adaah terselenggaranya pemberian dukungan, dorongan, fasilitasi, bagi pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya secara tertib, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta berkelanjutan.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu, yang pernah dilakukan peneliti terdahulu sebelumnya mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Cahyaning Imaniar Brilian (2017)	Implementasi Program Bantuan stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang	Kualitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dikatakan baik. Dalam implementasi program BSPS untuk masyarakat berpenghasilan rendah terdapat beberapa factor pendukung dan penghambat. Factor pendukung diantaranya adalah komunikasi dan kerja sama antar aktor pelaksana program sedangkan factor penghambat yaitu sumber daya manusia dan ketepatan sasaran terhadap program tersebut.
2	Lela	Tinjauan	Deskriptif	Hasil penelitian menjelas

	Anggraini (2017)	Fiqh Muamalah Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada masyarakat miskin di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim	Kualitatif	bahwa menurut Tinjauan Fiqh Muamalah program bedah rumah pada masyarakat miskin di Desa Air Limau masih belum sesuai dikarenakan ketidakadilan seseorang pemimpin dalam memilih objek dan subjek yang tepat sehingga apa yang terjadi di lapangan menyebabkan kecemburuan sosial karena masyarakat yang seharusnya masuk dalam kriteria bantuan bedah rumah tergeser oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan aparatur desa walaupun masuk dalam kriteria bantuan bedah rumah.
3	Cahya Ningtiyas (2018)	Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kelurahan	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Rejomulyo sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan temuan dilapangan bahwa pada tahap

		Rejomulyo		pengajuan proposal pencairan bantuan terdapat masyarakat yang menerima bahan bangunan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya. menerima bahan bangunan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya.
4	Khusnul Khotimah (2018)	Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam prespektif Ekonomi Islam	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah bahwa program bantuan rumah layak huni yang di danai pemerintah di Kecamatan Mesuji sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan teknik operasional kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan sudah baik dan masyarakat sudah berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan program tersebut yang diberikan pemerintah untuk rakyat. Sementara dalam perspektif ekonomi islam penyebab kemiskinan dapat digolongkan pada standar pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu Daruriyyah (kebutuhan primer), kebutuhan Hajjiyah (kebutuhan sekunder) dan

				kebutuhan Thasiniyah (kebutuhan tersier), seorang muslim harus mengalokasikan anggarannya secara utuh sesuai dengan tingkatan prioritas secara konsisten. Kebutuhan pada tingkat pertama harus dipenuhi kemudian kebutuhan yang ke dua dan ketiga. Konsumsi setelah dari ketiga ini diperkenankan akan tetapi tetap sesuai dengan syariat islam.
5.	Arif Budi Setiawan, 2018	Analisis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Rokan Hulu	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di akbupaten rokan hulu sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no.47 tahun 2015. Kegiatan dilaksanakan dengan swadaya masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. Namun dalam pelaksanaan terdapat

				beberapa kendala diantaranya keterbatasan swadaya masyarakat, menerima bantuan berada pada kategori lanjut usia, tingkat pendidikan yang tergolong rendah serta adanya program.
--	--	--	--	---

### C. Kerangka Pemikiran

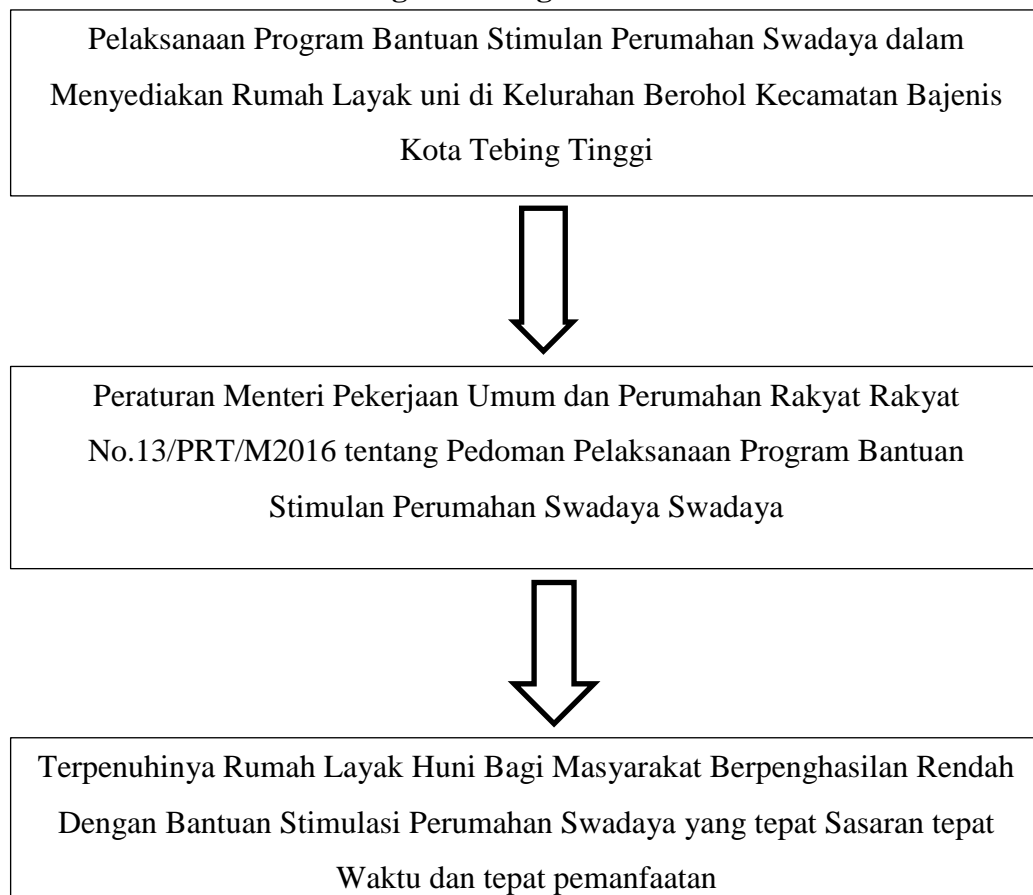
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Kerangka berfikir bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variable penelitian dan indicator-indikator yang menentukannya.

Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah

**Gambar 2.1**

#### **Bagan Kerangka Teoritis**



#### D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variable tersebut:

**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi	Standar dan sasaran kebijakan
	Sumber daya
	Hubungan antar organisasi
	Kondisi sosial ekonomi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai dan sifat sifat populasi tertentu. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *maturaltic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).<sup>41</sup> Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dan waktu penelitian merupakan wilayah geografis dan kronologis keberadaan Populasi penelitian. Kegiatan sampling dilakukan atas populasi yang dibatasi wilayah geografis dan kronologinya.<sup>42</sup>

##### 1. Lokasi Penelitian

Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi

##### 2. Waktu Penelitian

Februari 2020- November 2020

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti.<sup>43</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah para staf Dinas Perumahan Kota Tebing Tinggi dan Masyarakat Kelurahan Berohol penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

---

<sup>41</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 14.

<sup>42</sup>Purwanto, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 240.

<sup>43</sup>Budi Trianto, *Riset Modeling: Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian*, (Pekanbaru: Adh-Dhuha Institusi, 2016), h. 60



#### **D. Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedoman wawancara yang telah di susun peneliti dengan informan penelitian, yaitu staf Dinas Perumahan Kota Tebing Tinggi, Masyarakat Kelurahan Berohol, dan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.<sup>44</sup> Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta melalui dokumen-dokumen serta literatur yang terkait langsung dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh saat peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada Dinas Perumahan. Sedangkan untuk data yang berbentuk dokumen dan literatur adalah data yang diperoleh peneliti dari buku dan internet, serta sumber-sumber yang mendukung dalam penelitian ini. data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini.

#### **E. Informan Penelitian**

Informan dikatakan sebagai seseorang yang benar benar mengetahui persoalan atau permasalahan tertentu dan dapat memperoleh informasi yang terakurat, terpercaya, baik berupa pernyataan, keterangan, ataupun data data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

---

<sup>44</sup>Tarigan A, Dkk “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, Medan: La-Tansa Press

**Tabel 2.3**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Informasi Yang Ingin di Peroleh	Metode	Jumlah Informan
1	Kepala Bidang Dinas Perumahan Dan Permukiman	Informasi terkait kebijakan kebijakan ataupun peraturan peraturan dalam pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi meliputi, standarr dan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial dan ekonomi.	wawancara	1
2	Staff Dinas Perumahan dan Permukiman	Informasi terkait kebijakan kebijakan ataupun peraturan peraturan dalam pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi meliputi, standar dan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, kondisi dan ekonomi.	wawancara	2
3	Fasilitator Lapangan/ko nsultan pendamping	1. Pelaksanaan 2. Sosialisasi kepada masyarakat 3. Partisipasi dan keikutsertaan	wawancara	1

		<p>masyarakat</p> <p>4. Koordinasi antara dinas, fasilitator dan masyarakat</p> <p>5. Faktor pendukung dan penghambat</p>		
4	Masyarakat penerima bantuan BSPS	<p>1. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui program BSPS</p> <p>2. Informasi dan sosialisasi terkait dengan pengetahuan masyarakat mengenai adanya program BSPS di Kelurahan Berohol</p> <p>3. Pemahaman masyarakat terkait program BSPS</p> <p>4. Kendala yang di hadapi dalam mendapatkan bantuan BSPS</p>		10
5	Tokoh Masyarakat	<p>1. Pengetahuan mengenai BSPS</p> <p>2. Dampak adanya program BSPS</p>	Wawancara	2

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>45</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Observasi

---

<sup>45</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 16.

Observasi (pengamatan) adalah langkah awal dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena. Sasaran dari observasi ini ialah untuk menemukenali adanya masalah yang dihadapi.<sup>46</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>47</sup> Dalam proses ini penulisan melakukan wawancara yang tidak berstruktur yaitu melakukan wawancara yang bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan kepala Bidang dinas Perkim, (2) orang Staf Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tebing Tinggi, (1) orang Tenaga Fasilitator Lapangan, 2 orang tokoh masyarakat dan (10) orang penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>48</sup> Adapun dalam pelaksanaan metode ini adalah dengan mencatat data yang ada pada dokumen dokumen, buku pedoman dan arsip yang ada pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tebing Tinggi serta foto foto yang mendapat bantuan.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras, analisis memerlukan daya kreatif

---

<sup>46</sup>Sukaria Simulingga, *Metode Penelitian*, (Medan: Bibliografi, 2011), h. 56

<sup>47</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186

<sup>48</sup>Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 82

serta kemampuan intelektual tinggi, sehingga tiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasanya sama dengan sifat penelitiannya. Tugas peneliti adalah mengadakan analisis tentang data yang diperolehnya agar diketahui maknanya. Namun ada kemungkinan peneliti tidak dapat menemukan implikasi penelitiannya karena masih terlampau dekat dan masih terlampau terlibat dalam kerja lapangan.<sup>49</sup>

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>50</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*.<sup>51</sup>

#### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti marangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting.

#### 2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

#### 3. *Concluding Drawing/ verification*

Data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

---

<sup>49</sup>Rahmani, N. *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINS PRESS. 2016

<sup>50</sup>Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya 2010) h. 248

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penenlitan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 430.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kelurahan Berohol**

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintahan kota dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Tebing Tinggi adalah 38,438 km<sup>2</sup> dan terbagi atas 5 Kecamatan diantaranya: Kecamatan Rambutan, Padang Hilir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kecamatan Hulu, dan Kecamatan Bajenis. Serta Kota Tebing Tinggi terdiri dari 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Teluk Karang, Kelurahan pinang Mancung, Kelurahan Bandar Sakti, Kelurahan Bulian, Kelurahan Bandar sakti, Kelurahan Pelita dan Kelurahan Berohol.

Kelurahan Berohol merupakan kelurahan yang terletak dikecamatan bajenis kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.4660 Km<sup>2</sup> yang berkembang sebagai permukiman jasa dan perdagangan. Kelurahan berohol terdiri dari 5 lingkungan

##### **2. Luas wilayah dan Kondisi Geografis**

Letak Geografis Kecamatan Bajenis dibagian Barat Wilayah Kota Tebing Tinggi, dengan keadaan potografinya yang datar dan dilintasi sungai yang cukup panjang sehingga sebagian besar adalah areal persawahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan Rambutan dan Kecamatan Rambutan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Kota
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Hulu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Bandar Bejambu

Luas wilayah Kecamatan Bajenis ± 9,0780 Km<sup>2</sup> dengan rincian menurut Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Bandar Sakti : Luas wilayah ± 0.7810 Km<sup>2</sup>
- b. Kelurahan Berohol : Luas Wilayah ± 2.4660 Km<sup>2</sup>

- c. Kelurahan Bulian : Luas Wilayah  $\pm 1.2010 \text{ Km}^2$
- d. Kelurahan Durian : Luas Wilayah  $\pm 1.4040 \text{ Km}^2$
- e. Kelurahan Pelita : Luas Wilayah  $\pm 1.2960 \text{ Km}^2$
- f. Kelurahan Pinang Mancung : Luas Wilayah  $\pm 1.2683 \text{ Km}^2$
- g. Kelurahan Teluk Karang : Luas Wilayah  $\pm 0.3617 \text{ Km}^2$

Ditinjau dari segi orbitasi Pusat Pemerintah Kecamatan Bajenis dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah relative terjangkau dari segi perhubungan atau komunikasi dengan jarak  $\pm 5 \text{ Km}$ ,

### 3. Kependudukan

Jumlah penduduk kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota tebing Tinggi mempunyai 2033 Kartu Keluarga, dengan jumlah penduduk 7089. Yang tersebar dalam 5 Lingkungan dengan perincian tabel.:

**Tabel 4.1**  
**jumlah penduduk**

No	Lingkungan	KK	Laki Laki	Perempuan	Laki laki + Perempuan
1	I	499	811	901	1712
2	II	586	959	1104	2063
3	III	394	774	573	1347
4	IV	324	521	589	1110
5	V	230	470	387	857
	Jumlah	2033	3535	3554	7089

Sumber data: Kelurahan Berohol 2019

### 4. Keadaan sarana dan Prasarana Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi

#### a. Sarana tempat Ibadah

Rumah ibadah merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Untuk melihat jumlah sarana tempat ibadah keagamaan di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dapat di lihat dari tabel berikut:

**Table 4.2**  
**Jumlah Sarana Ibadah**

<b>No</b>	<b>Sarana Ibadah</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
1.	Masjid	4
2.	Mushola	3
3.	Gereja	-
4.	Vihara	3
5.	Kuil	-
6.	Klenteng	-
	<b>Total</b>	<b>10</b>

Sumber data: Kelurahan Berohol 2019

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Sarana Rumah Ibadah terbanyak adalah masjid sebanyak 4 Unit Rumah Ibadah, lalu sebanyak 3 Unit Musholah, dan 3 Unit Vihara. Sehingga jumlah sarana Rumah Ibadah di Kelurahan Berohol sebanyak 10 Unit Rumah Ibadah.

**b. Sarana di Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan**

Pentingnya kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi acuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera karena apabila seseorang itu sehat dapat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, untuk menunjang terciptanya masyarakat yang sehat maka diperlukan sarana dan prasarana serta profesi-profesi dibidang kesehatan dalam penanganan langsung mengenai masalah kesehatan. Berikut jumlah sarana dan prasaranakesehatan serta profesi-profesi di bidang kesehatan yang berada di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Sarana Kesehatan**

<b>No</b>	<b>Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Puskesmas	1



2.	Puskesmas pembantu	2
3.	Klinik	1
4.	Posyandu	4
	<b>Total</b>	<b>8</b>

Sumber data: Kelurahan Berohol 2019

Berdasarkan table 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Sarana Kesehatan terbanyak yaitu posyandu sebanyak 4 sarana kesehatan, lalu berikutnya yaitu puskesmas pembantu sebanyak 2 unit, puskesmas 1 unit, dan klinik sebanyak 1 unit. Sehingga jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Bajenis Kelurahan Berohol sebanyak 8 unit.

Tak kalah pentingnya seperti kesehatan, pendidikan juga merupakan salah satu factor yang harus mendapatkan perhatian khusus demi menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat. karena dengan pendidikan usaha untuk mencapai cita cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa bias terwujud. Oleh karenanya sarana dan prasarana di bidang pendidikan merupakan salah satu pendukung untuk mencapai tujuan yang di cita citakan tadi. Berikut ini sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	SD/Sederajat	3
2.	SMP/Sederajat	-
3.	SMA/Sederajat	-
	<b>Total</b>	<b>3</b>

Sumber data: Kelurahan Berohol 2019

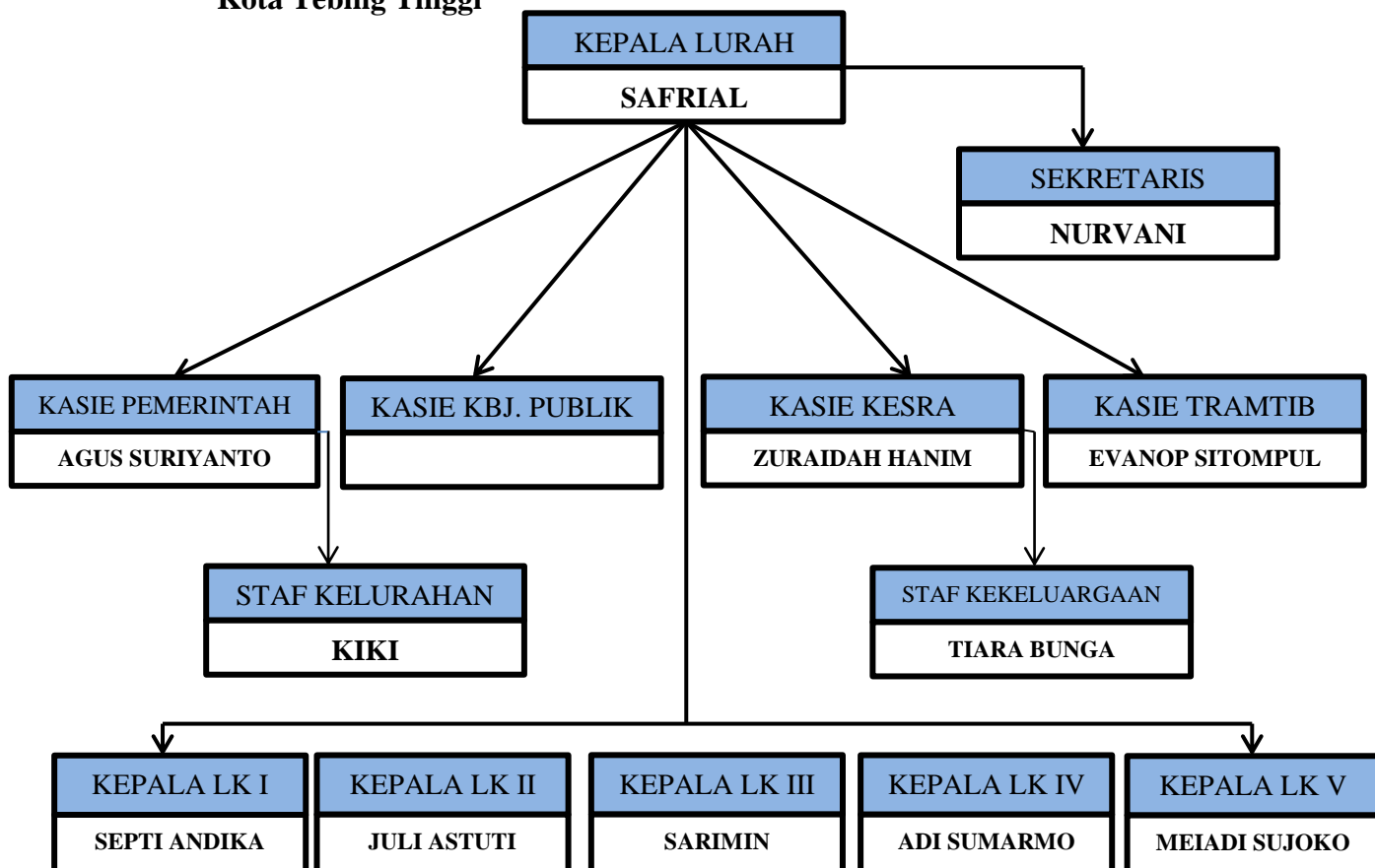
Dari data yang ada pada tabel 4.4 dapat kita lihat dan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis

hanya ada sarana pendidikan sekolah SD sebanyak 3 unit sementara untuk sarana pendidikan sekolah SMP dan SMA tidak ada sama sekali

### 5. Visi misi Kelurahan Berohol

Mewujudkan kelurahan Berohol yang ramah, bertaqwa, rukun dan berkeadilan yang bertumpu kepada profesionalisme pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perangkat kecamatan bajenis yaitu” Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dengan Bertumpu kepada Pofesionalisme Pelayanan demi meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

### 6. Struktur Organisasi/Lembaga Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi**

## **B. Hasil Penelitian**

### **Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi**

#### **a. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Kondisi atau sasaran yang ingin dicapai dari Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu untuk meningkatkan pelayanan yang prima bagi masyarakat terutama masyarakat di pedesaan dengan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, melakukan perbaikan rumah yang tidak layak huni, pengentasan daerah kumuh dan memperhatikan aspek aspek lingkungan yang sehat dan nyaman, kemudian terciptanya peran serta masyarakat untuk memelihara prasarana yang dibangun dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkannya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) merupakan bantuan pemerintah yang bersifat stimulant bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah. Rumah swadaya merupakan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Standar dan tujuan pelaksanaan mengacu kepada peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M2016 peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BSPS. Tujuan dari peraturan ini adalah agar penyaluran Bantuan stimulant Perumahan swadaya dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tebing Tinggi sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola program dan melakukan kordinasi dengan pihak fasilitator dan juga tidak luput peran serta masyarakat untuk mendukung

berjalannya kebijakan program ini di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Tepat atau tidaknya suatu sasaran kegiatan sangat tergantung dalam proses pelaksanaan program tersebut. Dalam pembangunan BSPS dinas Perkim mengikuti pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/M2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Sebelum melakukan pembangunan dan penetapan calon penerima Bantuan, Dinas Perumahan dan Permukiman sebelumnya telah melakukan pendataan keseluruhan rumah Tidak Layak Huni di Kota Tebing Tinggi. Hasil rekapitulasi pendataan rumah tidak layak huni di Kota Tebing Tinggi nantinya akan diusulkan ke dinas untuk memilih kecamatan mana yang akan di salurkan bantuan. Selanjutnya Dinas Perkim dibantu oleh fasilitator untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga pemberian bantuan benar benar tepat sasaran. Mereka juga melihat mana rumah yang harus di dahulukan karena keterbatasan anggaran, tidak semua masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dapat diberikan bantuan.

*“Para pelaksana sudah mengikuti standar yang diberikan oleh kementerian PUPR serta melakukan verifikasi sehingga tujuan dari program bantuan stimulant perumahan swadaya ini bisa tercapai. Program ini untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan kata lain program ini itu diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak, memiliki penghasilan, bukan sama sekali tidak punya penghasilan. Selain itu tujuan dari program ini yaitu masyarakat yang kondisinya tidak memenuhi standar untuk layak huni”<sup>52</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Andreansyah selaku staf Dinas Perkim Kota Tebing Tinggi:

*“Jadi penerima bantuan ini yang didata memang yang benar benar membutuhkan. Dengan program ini yang tadinya rumahnya bocor bisa jadi layak huni. Kalau mereka memiliki subsidi mau di percantik lagi rumahnya ya silahkan saja.”<sup>53</sup>*

---

<sup>52</sup> Hasbie Assidiqi, Kepala Bidang Dinas Perkim, wawancara di Tebing Tinggi 23 Februari 2020

<sup>53</sup> Andreansyah, Kepala Bidang Dinas Perkim, wawancara di Tebing Tinggi 23 Februari 2020

Hal tersebut juga dipertegas oleh Bapak Irfan:

*“Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memiliki rumah yang tidak layak huni, saya sebagai fasilitator melakukan survey secara langsung dan melihat kondisi fisik rumah sebelum pembangunan, jadi bantuan ini bisa benar benar tepat sasaran”*.<sup>54</sup>

Di Kelurahan Berohol terdapat 42 unit rumah yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019. Berikut rincian jumlah unit rumah per lingkungan yang menerima Bantuan BSPS.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di**  
**Kelurahan Berohol**

No	Lingkungan	Jumlah Penerima BSPS
1	LK I	-
2	LK II	6 KK
3	LK III	1 KK
4	LK IV	-
5	LK V	35 KK

Sumber data: Tenaga Fasilitator 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penerima BSPS terbanyak di lingkungan V yaitu sebanyak 35 unit rumah, pada lingkungan II ada 2 unit rumah, lingkungan III 1 unit rumah, dan pada lingkungan I dan IV tidak mendapatkan sama sekali

Namun dalam pelaksanaan Program Bantuan stimulant Perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol peneliti menemukan masalah yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Anto selaku masyarakat Kelurahan Berohol:.

<sup>54</sup>Irfan, Tenaga Fasilitator Lapangan, wawancara di Tebing Tinggi 24 Februari 2020

*“Penerima bantuan BSPS di Kelurahan Berohol ini rata rata orang yang mampu dan memiliki rumah gedung, yang nerima bantuan orang orang yang dekat dengan Keplingnya”.*<sup>55</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Pondel masyarakat Kelurahan Berohol Lingkungan IV masyarakat MBR dan memiliki rumah tidak layak huni:

*“Ibu gak dapat bantuan nya padahal ibu ikut mengajukan, malah yang dapat orang orang yang rumah nya bagus mereka sengaja membuat rumah gubuk untuk melengkapi berkas berkas proposal”.*<sup>56</sup>

Dari pernyataan diatas kita dapat ketahui bahwa Program BPS masih belum tepat sasaran dimana masih adanya masyarakat yang tidak mampu dan memiliki rumah tidak layak huni tapi tidak menerima bantuan BSPS. Rata rata para penerima bantuan stimulant perumahan swadaya di Kelurahan Berohol merupakan masyarakat yang mampu dalam hal ekonomi dan memiliki bangunan rumah yang gedung. Dalam hal ini terjadi ketidak jujuran, Para penerima bantuan ini bekerja sama dengan kepling sengaja membangun rumah gubuk untuk meyakinkan Tenaga Fasilitator pada saat dilakukan survey secara langsung padahal mereka sudah memiliki rumah dengan bangunan gedung yang mereka tempati.

Dalam pelaksanaan Pembangunan BSPS terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, padahal sebelum dilakukan pembangunan Dinas Perkim, Fasilitator dan kepala Desa telah melakukan pembekalan/ sosialisasi terkait konsep BSPS. Untuk lebih jelasnya ungkapan dari Bapak Irfan selaku TFL, mengatakan:

*“Kalau dalam pelaksanaan program BSPS kendala yang biasa dihadapi yaitu belum bisa mencapai target. Karna program ini diberi batasan waktu selama 3 bulan. Misalkan kendala cuaca seperti hujan sehingga panglong sulit untuk menghantar barang. Kemudian kendala lain yang terjadi yaitu swadaya masyarakat itu sendiri yang tidak ada. Karna kadang ada masyarakat yang kita arahkan tidak dijalankan. Misalkan saat sosialisasi kita sudah bilang kalau*

---

<sup>55</sup>Anto, Masyarakat Kelurahan Berohol, wawancara di Tebing Tinggi 25 Februari 2020

<sup>56</sup>Pondel, masyarakat Kelurahan Berohol, wawancara di Tebing Tinggi 25 Februari

*pembangunan ini harus ada swadaya sendiri dari masyarakat sedangkan pemerintah hanya stimulant (perangsang) saja. Tetapi praktek di lapangan tidak ada yang seperti itu, konsep gotong royong tidak berjalan sama sekali.*<sup>57</sup>

Peneliti juga menemukan masalah ataupun hambatan lain dalam pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol yaitu masyarakat penerima bantuan BSPS mengeluhkan bahwa bahan bangunan yang mereka terima tidak dengan kualitas yang baik. Hal itu didukung dengan adanya pengakuan dari Bapak Ilyas selaku penerima Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol, mengatakan:

*“Kendala nya itulah bahan yg kami terima kurang bagus kualitasnya”.*<sup>58</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Musiem, mengatakan:

*“Kalau kendala pada waktu itu sempat mengalami keterlambatan datang nya bahan dari panglong, dan bahan yang di berikan kepada kami juga tidak dengan kualitas baik.”*<sup>59</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor alam serta minimnya swadaya dari masyarakat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Berohol. Dan peneliti juga melihat bahwa implementor dalam pelaksanaan Program BSPS di Kelurahan Berohol masih belum memiliki ketegasan karena masih membiarkan masyarakat bekerja secara individual. Padahal mereka mengerti apa sebenarnya maksud dan konsep serta tujuan dari program BSPS yaitu dimana masyarakat dapat secara langsung berswadaya membangun rumah layak huni. Dengan istilah gotong royong berkelompok, diharapkan program ini menjadi pemicu semangat masyarakat agar berdaya guna dan mandiri. Tetapi pada kenyataannya kebijakan ini masih keliru untuk diterapkan sesuai dengan pedoman pelaksanaannya. meningkatkan keswadayaan masyarakat agar mandiri dan berdaya guna. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk partisipasi langsung masyarakat cenderung tidak mau bekerjasama dan apatis. Mereka lebih memilih membangun rumahnya sendiri dengan bantuan tukang bangunan. Implementor baik dari Dinas Perkim maupun

<sup>57</sup>Irfan, Tenaga Fasilitator Lapangan, wawancara di Tebing Tinggi 24 Februari 2020

<sup>58</sup>Ilyas, Penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 Oktober 2020

<sup>59</sup>Musiem, Penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 Oktober 2020

fasilitator belum mampu untuk mengajak masyarakat sadar dan faham dengan konsep dari BSPS walaupun sebelumnya sudah dilakukan pembekalan terlebih dahulu. Kemudian kendala lain pada saat pelaksanaan program BSPS di kelurahan Berohol yaitu bahan material yang diterima oleh masyarakat tidak dengan kualitas yang baik.

Walaupun dalam pembangunan BSPS di Kelurahan Berohol terdapat kendala dari partisipasi masyarakat dan juga ketegasan dari Dinas Perkim belum optimal, tetapi pembangunan BSPS di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi telah seluruhnya selesai dan dapat dihuni oleh masyarakat.

Berikut tanggapan dari masyarakat yang peneliti wawancarai:

Wawancara dengan Ibu Juli, mengatakan:

*“Sebelumnya ibu memang sudah melakukan pembangunan rumah di atas tanah milik pribadi, tapi harus terhenti karna keadaan perekonomian keluarga yang gak memungkinkan untuk melanjutkan pembangunannya, jd rumah yang ibu bangun itu di biarkan, kami tinggal dirumah sewah. Alhamdulillah dengan program BSPS ini ibu bisa melanjutkan pembangunannya wi”<sup>60</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak sareng:

*Sebelumnya memang sudah mempunyai rumah dan juga sudah memiliki sertifikat tanah rumah ini, kemarin dinding rumah ini terbuat dari papan, atap terbuat dari seng dan lantai setengah semen, dapurnya masih tanah, dengan kondisi dinding sudah rusak lama serta atap yang sudah berkarat, belum memiliki kamar mandi tapi memiliki sumur sebagai tempat mandi dan tempat cuci dan sudah memiliki wc walaupun sudah darurat.<sup>61</sup>*

---

<sup>60</sup>Juli, Penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 Oktober 2020

<sup>61</sup>Sareng, Penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 Oktober 2020



**Gambar 4.2 kondisi rumah penerima Bantuan Stimulan  
Perumahan Swadaya**



Berdasarkan dokumentasi diatas terlihat bahwa kondisi rumah penerima bantuan sebelum dilakukan membangun kondisi dinding masih papan, lantainya semen, dan atapnya seng. Dalam pembangunan yang paling dtonjolkan yakni 3 kompenen saja yaitu dinding, alas, atap dan pemberian tambahan fasilitas 1 pintu dan 2 jendela. Untuk dinding dibeton bagian depan belakang, samping kanan dan kiri, apabila alas rumah sudah dalam bentuk lantai maka tidak akan di ubah, untuk atap menggunakan seng. Namun masyarakat boleh mempercantik rumah tersebut jika ada subsidi/uang mereka sendiri. Hal tersebut diperbolehkan oleh dinas Perkim tergantung dari kesanggupan para penerima.

Setelah dilakukan observasi lapangan terhadap realisasi fisik hasil dari pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan berdasarkan isi kebijakan peneliti melihat bahwa masyarakat yang menerima bantuan merasa terbantu dengan adanya program BSPS. Karna rumah yang sebelumnya tidak layak huni sekarang setelah selesai pembangunan rumah tersebut sudah bisa dikategorikan rumah layak huni.

#### **b. Sumber daya**

Dalam implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya. Baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya dapat

menunjukkan kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu program.

Keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan itu sangat tergantung dari kemampuan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini manusia menjadi sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Jika para aktor pelaksana memiliki responibilitas dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan maka bisa di pastikan kebijakan tersebut akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan dalam isi kebijakan. Selain itu, sumber daya finansial dan sumber daya waktu juga perlu diperhitungkan dalam proses implementasi kebijakan.

## **1. Sumber daya manusia**

### **1) Fasilitator**

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) fasilitator adalah orang yang mendampingi masyarakat dari tahap sosialisasi sampai pada proses pembangunan. Fasilitator ini sendiri direkrut oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tebing Tinggi. Dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/2016 Fasilitator antara lain:

- a. Mengadakan sosialisasi, penyuluhan, serta pembekalan kepada masyarakat
- b. Melakukan penyeleksian calon penerima BSPS
- c. Mendampingi calon penerima BSPS dalam proses penyusunan dan pengajuan proposal
- d. Mendampingi para penerima bantuan dalam pemanfaatan bantuan
- e. Mendampingi penerima bantuan dalam melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban
- f. Menyusun laporan kegiatan

Dalam hal ini fasilitator berperan sangat penting dalam program BSPS karna mendampingi masyarakat sampai selesai pembangunan. Fasilitator mendampingi dan membantu masyarakat penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan, melakukan pengawasan secara langsung pada masyarakat terhadap

kemajuan pekerjaan, memfasilitasi proses pelaksanaan dan menjadi penengah apabila terjadi suatu konflik antar masyarakat. apabila terdapat kendala kendala selama pembangunan semua akan di bicarakan terlebih dahulu pada fasilitator.

## **2) Penerima Bantuan**

Penerima bantuan dalam program BSPS ini adalah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan memiliki rumah yang tidak layak huni. Penerima bantuan memiliki tugas antara lain:

- a. Harus ikut dalam kegiatan sosialisai, penyuluhan dan pembekalan
- b. Membentuk kelompok dengan sesama penerima bantuan
- c. Melakukan penyusunan dan pengajuan proposal
- d. Memanfaatkan bantuan dengan rencana yang telah disepakati
- e. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan
- f. Penerima bantuan menyusun laporan pertanggung jawaban

## **3) Lurah/Kepala Desa**

Lurah dan fasilitator lapangan melakukan pendataan rumah rumah mana saja yang akan menerima bantuan. Lurah, dinas perkim dan fasilitator juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang Program BSPS. Lurah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengetahui atau mengesahkan hasil seleksi calon penerima bantuan
- c. Memilih dan menetapkan kelompok penerima bantuan

## **4) Panglong/Penyedia Bahan Bangunan**

Tugas toko atau penyedia bahan bangunan adalah menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak.

## **2. Sumber Dana**

Selain sumber daya manusia, diperlukan juga adanya sumber daya lain, seperti dukungan dana untuk biaya peningkatan kualitas rumah.

Sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tahun 2019 berasal dari APBN. Bapak Hasbie Assidiqie selaku Kepala Bidang dinas Perkim mengatakan:

*“ anggaran dalam Program BSPS ini berasal dari APBN. Bantuan sebanyak Rp. 17. 500.000 untuk per unit rumah. Dana bantuan kita berikan kepada msyarakat melalui 2 tahap yakni tahap pertama 50% dan tahap ke dua 50%”*<sup>62</sup>

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada informan ditemukan bahwa Pencairan dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi diberikan kepada penerima dalam bentuk bahan material. Prosedur pencairan dana berpatokan dengan Peraturan Kementrian Perumahan Rakyat No.13/PRT/M2016 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu: Pencairan dana Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya di lakukan 2 tahap. Tahap pertama sebesar 50% dari jumlah bantuan dan tahap kedua diberikan sebesar 50% dari jumlah bantuan setelah pekerjaan direalisasikan paling rendah 30% pembangunannya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh ibu Suriani yang merupakan penerima bantuan stimulant perumahan swadaya:

*“Dana yang kami terima tidak dalam bentuk uang, tapi di kasih dalam bentuk material wi, dan dikasih dalam 2 tahap, besar dana yang diberikan pada program ini sebesar Rp. 17.500.000. sebesar 15 juta itu dibelanjakan untuk bahan bangunan, dan sebesar 2.500.000 itu sebagai upah tukang. Jadi pada tahap pertama cair sebesar Rp. 7. 5000.000 itu langsung diterima dalam bentuk bahan bangunan, dan upah tukangnya juga cair setengahnya wi. Sisanya dicairkan pada tahap ke dua setelah ada bukti progress pembangunan 30%.”*<sup>63</sup>

Hal tersebut senada dengan pernyataan bapak Jarnok selaku penerima bantuan stimulant perumahan swadaya:

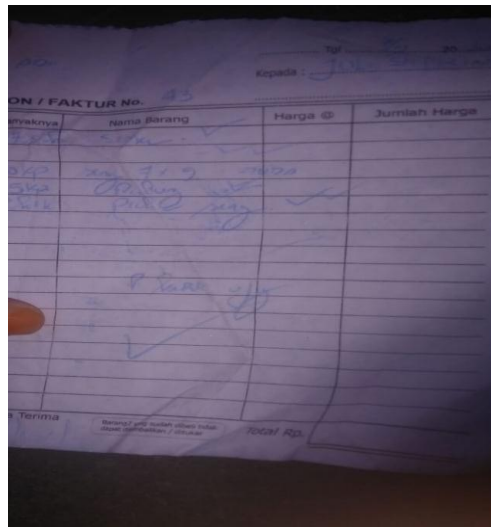
---

<sup>62</sup>Hasbie Assidiqie, Kepala Bidang Dinas Perkim, wawancara di Tebing Tinggi 23 Februari 2020

<sup>63</sup>Suriani, Penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 Oktober 2020

*“Bapak mendapatkan bantuan material seperti semen, batu bata, jendela, pintu dan lain lain. Jadi sebelumnya kami memang di suruh list bahan apa yang kami perlukan. Uang hanya diberikan untuk upah tukang.”<sup>64</sup>*

Hasil observasi yang peneliti lakukan kepada salah satu penerima bantuan temukan bahwa pencairan dana tidak diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan diberikan kepada penerima bantuan berupa bahan material. Hal tersebut juga didukung dengan adanya dokumentasi bukti nota dari salah satu masyarakat penerima bantuan.



**Gambar 4.3 Gambar nota penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

Dari gambar diatas dapat dibuktikan bahwa pencairan dana bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk material yang dibelanjakan dari pihak pengurus.

### **c. Hubungan antar organisasi**

Dalam pelaksanaan suatu program di perlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara instansi demi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan. Kordinasi ini dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk diwilayah

<sup>64</sup>Jarnok, Penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 Oktober 2020

Kelurahan Berhol Kota Tebing Tinggi. Koordinasi ini dilakukan oleh para aktor pelaksana mulai dari tingkat pusat, kota, hingga desa penerima. Kegiatan koordinasi merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab dari para aktor pelaksana. Sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Hasbie Assidiqie selaku Kepala Bidang Dinas Perkim Kota Tebing Tinggi:

*“Kordinasi tentu ada dilakukan, tenaga fasilitator lapangan diberikan pembekalan dan pelatihatam, karna itu sangat penting bagi fasilitator lapangan, briefing juga sering diberikan.”<sup>65</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemerintah pusat selalu memantau perkembangan pelaksanaan Program Bantuan stimulant Perumahan swadaya (BSPS). Melalui sering diberikan nya briefing, semua perubahan informasi, ataupun masalah yang dihadapi akan diketahui dan akan dicarikan solusi. Kegiatan seperti ini memang penting agar program yang di gagas oleh pemerintah benar benar mampu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan rakyat.

Pola hubungan antara Fasilitator dan Dinas Perkim diawali melalui tahap penyeleksian para calon penerima bantuan. Kepala Desa memberikan usulan rumah rumah tidak layak yang ada di desanya, kemudian data tersebut diseleksi oleh dinas perkim, dinas perkim berkoordinasi dengan fasilitator lapangan dalam menentukan calon penerima bantuan. Setelah data di verifikasi, dinas kepala desa serta fasilitator melakukan sosialisasi/pembekalan terhadap masyarakat.

Dari hasil pengamatan peneliti, hubungan antar oranisasi sudah terjalin dengan baik. Sesuai dengan tanggapan yang diberikan oleh Bapak Ifan selaku Tenaga Fasilitator Lapangan:

*“Koordinasi antara dinas perkim, fasilitator dan kepala desa serta masyarakat berjalan sudah bagus. Karna pada saat sosialisasi kita panggil orang dinas, kepala desa, serta masyarakat penerima, jadi disitu diberikan pemahaman terhadap masyarakat penerima terkait program BSPS ini.”<sup>66</sup>*

---

<sup>65</sup>Hasbie Assidiqie, Kepala Bidang Dinas Perkim, wawancara di Tebing Tinggi 23 Februari 2020

<sup>66</sup>Irfan, Tenaga Fasilitator Lapangan, wawancara di Tebing Tinggi 24 Februari 2020

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa sebelumnya dinas perkim, fasilitator, dan kepala desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang konsep program BSPS. Pada hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa Dinas Perkim melakukan Koordinasi kepada Kepala desa dan Fasilitator terkait standard dan Kebijakan yang telah ditetapkan sebagai prosedur pelaksanaan. Di Kelurahan Berohol Dinas Perkim didampingi oleh Tenaga Fasilitator dalam menentukan dan memilih calon penerima bantuan yang termasuk dalam kriteria sasaran kebijakan. Sehingga untuk pemberitahuan kepada masyarakat terkait adanya program BPSD disampaikan Kepala Desa menginformasikan kepada setiap Kepling, dan Kepling merekomendasikan rumah rumah yang tidak layak huni yang ada lingkungannya kepada kelurahan. Hal tersebut senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Tukiran masyarakat penerima Bantuan:

*“Bapak tau bantuan BPSD ini dari Kepling bahwa sanya ada bantuan untuk rumah tidak layak huni, kemudian orang dinas sama fasilitator melakukan sosialisasi, dsitu dijelaskan tentang bantuan ini seperti apa, setelah itu ngurus berkas dibantu sama fasilitatornya”*<sup>67</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Totok:

*“Bapak tau bantuan BPSD ini dikabari Kepling, kemudian orang dinas sama fasilitator melakukan sosialisasi, dsitu dijelaskan tentang bantuan ini seperti apa, setelah itu ngurus berkas dibantu sama fasilitator, karena Bapak yang bukan orang berpendidikan merasa sulit mengerjakan berkas berkas itu sendirian”*.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti melihat bahwa untuk koordinasi antara Dinas Perkim dengan Fasilitator dilakukan pemberitahuan terkait apa saja persyaratan yang harus dilengkapi apabila masyarakat sudah ditetapkan menjadi penerima bantuan. Untuk pendataan calon penerima bantuan di data oleh kepala Desa atas rekomendasi dari kepala Lingkungan kemudian diusulkan kepada Dinas Perkim untuk dilakukan verifikasi agar nantinya disurvei sebagai penetapan penerima.

---

<sup>67</sup>Tukiran, penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 oktober 2020

<sup>68</sup>Totok, penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 oktober 2020

Sedangkan pengamatan penulis terkait hubungan antar fasilitator dengan masyarakat penerima bantuan terlihat sangat baik para penerima bantuan menghargai dan merasa sangat terbantu karena fasilitator banyak membantu mereka dan selalu mendampingi mulai dari penyusunan proposal sampai pembangunan selesai.

#### **d. Dampak Sosial dan Ekonomi**

##### **1) Kondisi sosial**

Dampak sosial yaitu perubahan yang terjadi pada manusia, misalnya interaksi atau hubungan antar individu yang terjadi setelah adanya suatu program.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak paimin, mengatakan:

*“Bapak senang dengan adanya program ini karena Bapak merasa terbantu untuk membangun rumah, yang sebelumnya bisa di bilang rumah Bapak kurang nyaman, Alhamdulillah sekarang rumah Bapak ud nyaman untuk ditempati”<sup>69</sup>*

Lain halnya dengan Bapak Anto yang mengatakan bahwa:

*“Mendukung adanya program ini, jadi kami sebagai masyarakat di kelurahan Berohol senang dengan adanya program ini, tapi yang ada, program bantuan ini malah membuat masyarakat iri satu sama lain (kecemburuan sosial) karena rata rata penerima bantuan ini merupakan masyarakat yang mampu dan memiliki rumah yang layak huni, atau bisa dibilang bantuan ini tidak tepat sasaran.”<sup>70</sup>*

Kondisi sosial yang peneliti amati adalah ditemukan bahwa masyarakat penerima bantuan merasa senang dan terbantu dengan adanya program BSPS. di sisi lain program ini juga menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat yang disebabkan karena sebagian dari penyaluran bantuan ini tidak tepat sasaran.

##### **2) Kondisi Ekonomi**

Dari pengamatan yang peneliti lakukan di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, kondisi ekonomi penerima Bantuan rata rata masyarakat yang memiliki rumah gedung dan masih berkecukupan dalam hal ekonomi. Namun peneliti mencoba melakukan wawancara terhadap beberapa

---

<sup>69</sup>Paimin, penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 oktober 2020

<sup>70</sup>Anto, penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 oktober 2020



penerima Bantuan yang tepat sasaran yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah dan jauh dari kata berkecukupan. Berikut pernyataan dari Ibu Suriani menyatakan Bahwa:

*“Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini ibu jadi bisa membangun rumah. Kalau soal kondisi ekonomi tidak ada yang berubah, kami masih bekerja seperti biasa tapi setidaknya untuk masalah rumah sudah tidak memikirkan banyak biaya lagi”.*<sup>71</sup>

Pernyataan yang hamir sama juga dikemukakan oleh Bapak Mulianto

*“Untuk ekonomi sendiri tidak berapa banyak ada perubahan karenabantuan ini hanya rumah kami yang di bangun, tapi paling tidak sekarang ini kami sudah bisa mengumpulkan untuk kebutuhan lain, dan sudah tidak memikirkan untuk membetulkan rumah lagi. Tapi karna kemarin bahan yang dikasih tidak bagus kualitasnya,ada yang uda minta diganti lagi padahal belum lama.*

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan stimulant Perumahan swadaya kondisi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setelah mendapatkan bantuan ini tidak begitu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, namun jika melihat dari kondisi kesehatan tentu sangat berpengaruh, masyarakat penerima bantuan stimulant perumahan swadaya lebih terlindungi dari kondisi cuaca yang tidak selalu menguntungkan, masyarakat juga lebih merasa aman dan tidak merasa ketakutan lagi.

### **C. Pembahasan**

#### **Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi**

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam menyediakan rumah layak huni di

---

<sup>71</sup>Suriani, Penerima Bantuan, wawancara di Tebing Tinggi 20 oktober 2020

Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dibahas dalam beberapa aspek berikut ini:

**a. Standard dan sasaran Kebijakan**

Dalam menjalankan suatu Program perlu adanya standard dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur agar bisa terealisasi. Apabila standard an sasaran kebijakan kabur, maka akan menimbulkan konflik diantara para pelaksana.

Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) merupakan bantuan bersifat stimulant yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/meningkatkan kualitas rumahnya. Rumah swadaya merupakan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Standar dan tujuan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016. Peraturan ini dimaksudkan menjadi pedoman para pelaksana. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintha kota, pemerintah desa serta masyarakat agar penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan swadaya dapat dilaksanakan dengan tertib, efesien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun dalam pelaksanaan Program Bantuan stimulant Perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis penyalusan BSPS masih belum bisa dikatakan tepat sasaran. Dimana rata rata penerima bantuan merupakan masyarakat yang berkecukupan dalam hal ekonomi dan memiliki bangunan rumah yang layak, hal tersebut tentu lari dari tujuan dan sasaran dari program BSPS ini. Dimana Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah serta meiliki rumah yang tidak layak untuk ditempati..

Kemudian dalam pelaksanaan Program BSPS di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat. Peneliti juga melihat bahwa Implementor dalam pelaksanaan Program BSPS di Kelurahan Berohol masih belum memiliki ketegasan karena masyarakat masih dibiarkan bekerja secara individual. Padahal mereka mengerti dan faham maksud konsep dan tujuan program BSPS ini yaitu

untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat agar bisa mandiri dan berdaya guna. Dalam hal ini peran masyarakat sangat besar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program BSPS, karena dalam hal pembangunan rumah dilakukan secara bergotong royong dengan sesama kelompok penerima bantuan. Dengan istilah berkelompok dan bergotong royong, diharapkan adanya program ini bisa menjadi pemicu semangat masyarakat agar berdaya guna dan mandiri. Tetapi pada kenyataannya kebijakan ini masih keliru untuk dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembangunan partisipasi dari masyarakat cenderung tidak mau bekerjasama, mereka lebih memilih membangun rumahnya sendiri dengan bantuan tukang bangunan.

#### **b. Sumber Daya**

Tidak dipungkiri bahwa dalam melaksanakan sebuah program ketersediaan sumber daya menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya non manusia.

Hasil pengamatan peneliti sumber daya Pelaksanaan program Bantuan stimulant Perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yakni sumber daya manusia meliputi staff Dinas Perkim, Staff Kelurahan, Fasilitator serta masyarakat baik masyarakat dari kelompok sasaran maupun masyarakat umum. Sumber daya dengan konsep yang melekat pada kegiatan BSPS yaitu mengharuskan masyarakat penerima bantuan agar mampu membiasakan diri untuk mengembangkan diri sendiri dan berkelompok dalam menyelesaikan pembangunan rumah. Namun pada pelaksanaan pembangunan program BSPS terjadi masalah yaitu dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilakukan dengan cara bergotong royong dengan sesama kelompok tapi hal tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya, pembangunan masih dilakukan secara sendiri sendiri. Sedangkan sumber daya yang berupa materi yakni dana program BSPS berasal dari APBN.

### **c. Hubungan antar Organisasi**

Koordinasi yaitu kemampuan yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan sebuah program diperlukan adanya dukungan koordinasi dengan instansi yang lainnya. Maka, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara instansi demi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara para pelaksana maka peluang terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil, namun apabila koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat kurang baik maka peluang terjadinya kesalahan-kesalahan dan konflik juga semakin besar.

Adapun yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan Program BPS di Kelurahan Berohol Pola hubungan antara Fasilitator dan Dinas Perkim diawali melalui tahap penyeleksian para calon penerima bantuan. Kepala desa memberikan usulan rumah-rumah yang tidak layak huni yang ada didesanya, kemudian data tersebut diseleksi oleh dinas perkim, dinas perkim berkoordinasi dengan fasilitator lapangan dalam menentukan calon penerima bantuan. Setelah data di verifikasi, dinas kepala desa serta fasilitator melakukan sosialisasi/pembekalan terhadap masyarakat.

Menurut pengamatan peneliti, hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari respon mereka mengenai BPS di Kelurahan Berohol. Selain itu pelaksanaannya dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak menyebabkan bias dalam komunikasi dan penyampaian informasi.

### **d. Dampak sosial ekonomi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat baik hal positif maupun negatif. Secara sederhana dampak bisa diartikan sebagai akibat dalam setiap keputusan yang sudah diambil oleh seseorang atasannya biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Hasil pelaksanaan Bantuan stimulant Perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol telah mampu merubah kondisi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.

dikarenakan rumah yang kondisi awalnya tidak layak dan lingkungan yang kurang baik setelah dilakukan perbaikan rumah tersebut menjadi lebih tertata dan lebih sehat. Kesehatan masyarakat yang meningkat ini akhirnya secara perlahan juga berdampak pada perubahan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung menekan biaya hidup penerima bantuan utamanya pada biaya perbaikan rumah karena rumahnya sudah dalam kondisi yang layak.

Adapun manfaat atau dampak dari pelaksanaan BSPS ini bagi penerima bantuan berdasarkan data yang peneliti dapatkan maka dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut (1) mengurangi beban hidup masyarakat miskin, karena tidak lagi memiliki tanggungan untuk memperbaiki rumah, (2) meningkatkan kepercayaan diri, (3) meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah bisa di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup lainnya, seperti pendidikan, modal usaha, dan peningkatan kualitas sandang dan pangan, (4) dengan rumah yang sudah memenuhi kriteria layak huni, maka akan meningkatkan kualitas kesehatan dan memberikan rasa aman untuk penghuninya. (6) berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Selain itu dampak negatif yang muncul dalam pelaksanaan BPS di Kelurahan Berohol yaitu terjadinya kecemburuan sosial antar masyarakat karena penyaluran bantuan BPS masih belum tepat sasaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam menyediakan rumah layak huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dirangkum dalam beberapa point:

##### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mengacu kepada peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M2016 peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Terdapat masalah dalam penetapan calon penerima bantuan di Kelurahan Berohol yaitu adanya ketidak jujuran dalam pemilihan rumah yang akan di rekomendasikan sebagai calon penerima bantuan. Seharusnya kebijakan program BSPS disusun dengan kenyataan yang ada dilapangan bahwa masyarakat belum mampu untuk berswadaya dalam melakukan pembangunan rumah.

##### **2. Sumber Daya**

Dengan konsep yang melekat pada kegiatan BSPS yaitu mengharuskan masyarakat penerima bantuan agar mampu membiasakan diri untuk mengembangkan diri sendiri dan berkelompok dalam menyelesaikan pembangunan rumah. Namun dalam pelaksanaan program BSPS terdapat masalah dimana dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilakukan secara bergotong royong dengan kelompok tapi pada kenyataannya masih di lakukan sendiri sendiri.

Sumber dana dalam Program BSPS di Kelurahan Berohol Berasal dari APBN dengan rincian setiap rumah diberi Rp. 17. 500.000

### 3. Hubungan antar organisasi

Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari respon mereka mengenai BSPS di Kelurahan Berohol. Selain itu pelaksanaannya dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak menyebabkan bias dalam komunikasi dan penyampaian informasi.

### 4. Dampak sosial ekonomi

Program BSPS mampu menjadikan kondisi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Dikarenakan rumah yang semula adalah rumah yang tidak layak untuk di huni dan lingkungan yang kurang baik setelah dilakukan perbaikan rumah rumah tersebut sekarang sudah menjadi lebih tertata dan sehat. Kesehatan yang meningkat akhirnya secara perlahan juga berdampak kepada perubahan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung menekan biaya hidup penerima bantuan terutama pada biaya untuk perbaikan rumah, karena rumah tersebut sudah dalam kondisi yang sudah layak. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan perumahan maka para penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup lainnya seperti kesehatan, pendidikan, atau peningkatan kualitas sandang dan papannya sehingga hal itu juga menjadikan taraf hidupnya meningkat. Selain itu karena sudah memiliki rumah yang layak huni maka akan meningkatkan kualitas kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang sehat dan secara psikologis berdampak pada peningkatan rasa percaya diri dan tentunya juga meningkatkan status sosialnya. Dan untuk jangka panjang akan menurunkan angka kemiskinan. Dimana dari semua dampak tersebut merupakan faktor-faktor yang menjadi syarat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program BSPS di ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dampak negatif yang muncul dalam pelaksanaan BSPS di Kelurahan

Berohol yaitu terjadinya kecemburuan sosial antar masyarakat karena penyaluran bantuan BSPS masih belum tepat sasaran.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam menyediakan rumah layak huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi adalah:

1. Dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat tentang konsep dari program BSPS agar tidak terjadi kesalahan kesalahan dalam pembangunan.
2. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seharusnya sebelum dilaksanakannya program masyarakat khususnya calon penerima bantuan diberikan pelatihan khusus agar masyarakat bisa mandiri dan tidak menyerahkan semua kepada pengurus.
3. Koordinasi dan komunikasi antara dinas perkim, fasilitator serta masyarakat agar bisa lebih terbuka lagi supaya tidak terjadi kesalah atau *miss-komunikasi*



## DAFTAR PUSTAKA

Alquran Karim

Adisasmita, Raharjo, "*Analisis Kebijakan Publik*", Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015

Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Budi Utama. 2019

Karim, Adiwarmar, "Ekonomi Mikro Islam Jakarta: Raja Grafindo Edisi Ketiga. s2010

Akmal, Azhari Tarigan., Dkk "*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*", Medan: La-Tansa Press

Anshar, Muhammad, " Peran dan Dampak Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Warga Kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan", *Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No.2 Juli-Desember 2017

Anto, Masyarakat Kelurahan Berohol, wawancara di Tebing Tinggi 23 Februari 2020

Dr. Urip Santoso, "*Hukum Perumahan*", Jakarta: Prenadamedia, 2014

Kusumastuti, Dora., "*Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan*" Dalam jurnal Kebijakan Publik, Vol:4. No.3 September 2015

Isnaini Harahap, et.,Al. Analisis Tingkat kesenjangan Pendapatan pada masyarakat Tebing Tinggi, Medan:FEBI UIN-SU Press, 2015

Lexy J. Moeleong., "*Metodelogi Penelitian kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006

\_\_\_\_\_ "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Rosdakarya. 2010

Nurwati, Nunung, "*Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*", Dalam Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol:10.No. 1. Januari. 2008

Sudjana, Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat dan Teori Pendukung serta Asas, Bandung: Falah Production. 2004

- Sugarto, Edi., “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Bandung: PT Ravika Adimatama. 2005
- Suprijanto, Iwan “*Revormasi Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman "dalam jurnal Dimensi Teknik Arsitektur. Vol. 32, No. 2. Desember 2004*
- Prof. Dr. Sugiyono., “Memahami Penelitian Kualitatif”, Bandung: CV. Alfabeta. 2010
- Purwanto., “*Metodelogi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010*
- Rosmedi dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, Sumedang: Alqaprit Jatienegoro. 2006
- Simulingga, Sukaria., “*Metode Penelitian*”, Medan: Bibliografi. 2011
- Sugiyono., “*Metode Penenlitian Bisnis*”, Bandung: Alfabeta. 2008
- \_\_\_\_\_ “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: Alfabeta. 2014
- Suradi, “pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”, dalam Jurnal Ekonomi, Vol:17 No 3. 2012
- Trianto, Budi., “*Riset Modeling: Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian*”, Pekanbaru: Adh-Dhuha Institusi. 2016
- Ucok, Penerima BSPS, *wawancara* di Tebing Tinggi, Tanggal 23 Februari 2020
- Uddin B.Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, Makassar: CV. Sah Media, 2017
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)
- UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang Undang Repubik Indonesia Nomer 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Waryono Abdul Ghafur,et.Al., *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Prodi Kesejahteraan Sosial UIN suka dan Samudra Biru, 2012

Yosita, Lucy., et al, *Strategi Perencanaan dan Perancangan Perumahan pada era Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish. 2012

Yustono, Ali “ 150 Gakin Tebing Tinggi Terima Bantuan RTLH”,  
<https://mdn.bis.id/n/111027/> 12 Agustus 2014

Zastrow dan Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009

## CURRICULUM VITAE

Nama : Dewi Herlina  
Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 12 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam  
Alamat : Jl. Setia agung Gg. Melati III Sunggal Kanan  
Status : Belum Menikah  
No. Hp : -  
Alamat E-mail : dherlina43@gmail.com  
Anak ke : 7 dari 7 Bersaudara  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Dwi anto  
Ibu : Boini

## Riwayat Pendidikan

1. Tamatan MIN RAMBUTAN berijazah 2010
2. Tamatan MTsN Tebing Tinggi berijazah tahun 2013
3. Tamatan SMAN 2 Tebing Tinggi berijazah tahun 2016

## Organisasi

Lembaga Kreativitas Seni Mahasiswa

Lampiran 1  
Foto rumah sebelum di renovasi







Lampiran 2  
Rumah sesudah di renovasi







